

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TAHUN 2024

**Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok B No. 14,
Pangkajene Sidenreng
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
*Email : rensidrap@yahoo.co.id***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA-P) Tahun 2018-2023. Pengukuran capaian kinerja diukur dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun 2023. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh hasil pencapaian target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaannya terhadap sumber daya yang dimiliki selama tahun 2023. Laporan ini juga memuat realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2023. Selama kurun waktu tahun 2023, sejumlah capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura telah berhasil memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat beberapa target indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta berguna bagi semua pihak.



Pangkajene Sidenreng, 18 Januari 2024

Kepala Dinas

IBRAHIM, SP

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP : 19720233 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	I-1
1.2 Issu-Issu/ Permasalahan Strategis Organisasi	I-4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-1
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-26
BAB IV PENUTUP	V-1
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	IV-1
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	IV-2
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023..... I-2
Tabel 1.2	Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2023 I-3
Tabel 1.3	Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 I-3
Tabel 1.4	Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 I-3
Tabel 1.5	Issu-issu Strategis dan Identifikasi Masalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang..... I-4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... II-2
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017..... III-1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 III-3
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 3 (Tiga) Tahun Terakhir III-5
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra III-6
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan Standar Nasional III-9
Tabel 3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1 III-15
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 III-17
Tabel 3.9	Hasil Penilaian SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023..... III-17
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 3 (Tiga) Tahun Terakhir III-18

Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	III-18
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Standar Nasional	III-19
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2	III-25
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Kegiatan APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023.....	III-27
Tabel 4.1.	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	IV-1

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	III-7
Grafik 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	III-7
Grafik 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	III-8
Grafik 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	III-8
Grafik 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Prediksi Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra...	III-19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
- Lampiran II. Laporan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
- Lampiran III. Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 sejumlah 106 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK), sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	49	43	88
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	3	14
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Selanjutnya klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	28	15	43
2	Golongan III	29	27	56
3	Golongan II	3	4	7
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Klasifikasi PNS dan PPT-PK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3

Klasifikasi PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	9	11	20
2	Strata 1	37	29	66
3	Diploma 3	-	2	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	3	1	4
	Jumlah	49	43	92

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Tabel 1.4

Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	11	1	12
3	Diploma 3	-	1	1
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	-	1	1
	Jumlah	11	3	14

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

1.2. Isu-Issu/ Permasalahan Strategis Organisasi

Isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bergesernya pola tanam perubahan keanekaragaman hayati yang menyebabkan ledakan hama dan penyakit tanaman yang akhirnya mengakibatkan penurunan produksi - Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya gangguan siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, peningkatan frekwensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan banjir dan kekeringan - Belum dimanfaatkannya pestisida alami dan biopestisida

2	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih rendah	Peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan - Terjadinya kelangkaan pupuk disaat dibutuhkan - Masih kurangnya sarana alsin untuk penggunaan secara bersamaan - Belum berkembangnya penangkar benih/bibit pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru - Tidak tersedianya pupuk di setiap musim tanam - Kurangnya pengadaan alsin - Masih rendahnya minatnya petani untuk menjadi penangkar benih/bibit pertanian
4	Belum optimalnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan	Belum adanya Perbup tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum disosialisasikan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5	Rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian	Kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian	Kurangnya bimbingan teknis, pelatihan dan magang bagi SDM pertanian
6	Terbatasnya akses petani terhadap permodalan	Kurangnya informasi kepada petani tentang sumber permodalan	Terbatasnya pembinaan dan pendampingan bagi petani tentang permodalan
7	Menurunnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian	Kurang menjanjikan bidang pertanian bagi perekonomian dan kesejahteraan hidup generasi muda	Belum berkembangnya agroindustri di pedesaan
8	Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya konsumsi pangan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berkembangnya diversifikasi pangan

		- Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan	- Kurangnya pembinaan dan bantuan pemanfaatan pekarangan
9	Belum optimalnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	Belum optimalnya penanganan cadangan pangan masyarakat	Kurangnya lumbung pangan masyarakat
10.	Belum optimalnya pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	- Masih tingginya harga pangan utama	- Terbatasnya lembaga pemasaran pangan daerah
		- Terbatasnya akses pangan terutama di daerah terpencil	- Terhambatnya jalur distribusi pangan
			- Terbatasnya sistem informasi pasar

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (*output*) atas kegiatan dan wujud kinerja (*outcome*) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	22,95 %
		Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB	1,23 %
		Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB	1,50 %
		Ketersediaan Pangan Utama	1.048,66 Kg
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Prediksi Nilai SAKIP	79 (BB)

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran atau sasaran dari kegiatan utama. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan untuk mendapatkan informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	1. Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	$(\text{Jumlah PDRB Subsektor Tanaman Pangan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100 \%$
		2. Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB	$(\text{Jumlah PDRB Subsektor Hortikultura} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100 \%$
		3. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB	$(\text{Jumlah PDRB Subsektor Perkebunan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100 \%$
		4. Ketersediaan Pangan Utama	$(\text{Rata2 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)} / \text{Jumlah Penduduk}) \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	5. Prediksi Nilai SAKIP	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	11,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber: IKU DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dan indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan membandingkan target kinerja tahun 2023 dengan

realisasi kinerja tahun 2023, dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, dengan target kinerja jangka menengah (Renstra) ataupun dengan standar nasional (jika ada).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis. Capaian kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	22,95	23,57*	102,70
		Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,23	1,03*	83,74
		Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,50	2,22*	148,00
		Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.048,66	907,85*	86,57
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Prediksi Nilai SAKIP	79 (BB)	72,40 (BB)	91,65

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.

*Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023.

Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1**Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu "Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", dan tujuan "Meningkatkan pendapatan masyarakat". Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi*	Capaian (%)
1	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	22,95	23,57	102,70
2	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,23	1,03	83,74
3	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,50	2,22	148,00
4	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.048,66	907,85	86,57
Rata-rata Capaian				105,25

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.

*Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu "**Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah**", dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB yaitu 102,70%, indikator Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB yaitu 83,74%, indikator Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB yaitu 148,00% dan Indikator Ketersediaan Pangan Utama yaitu 86,57%, sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu 105,25% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Untuk memperoleh “Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB” digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah PDRB Subsektor Tanaman Pangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, maka diperoleh nilai Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB sebanyak 23,57%.

Untuk menghitung “Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB” digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah PDRB Subsektor Hortikultura}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, maka diperoleh nilai Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB sebanyak 1,03%.

Sedangkan untuk menghitung Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah PDRB Subsektor Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas, maka berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, maka diperoleh nilai Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB sebanyak 2,22%.

Formulasi perhitungan untuk ketersediaan pangan utama dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Pangan Utama} = \frac{\text{Rata2 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan diperoleh data Ketersediaan Pangan Utama sebanyak 907,85 Kg.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1
3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023*
1	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	18,31	18,93	23,57
2	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,06	1,20	1,03
3	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,51	1,72	2,22
4	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	852	932,03	907,85

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.

*Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2021-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB mengalami tren peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 18,31% kemudian meningkat menjadi 18,93% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga meningkat menjadi 23,57%.
- Indikator Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 1,06% kemudian meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,03%.

- Indikator Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB mengalami tren peningkatan realisasi kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan nilai realisasi capaian masing-masing sebesar 1,51%, 1,72% dan 2,22%.
- Indikator Ketersediaan Pangan Utama mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 852 Kg kemudian meningkat menjadi 932,03 Kg pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 907,85 Kg.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah Renstra

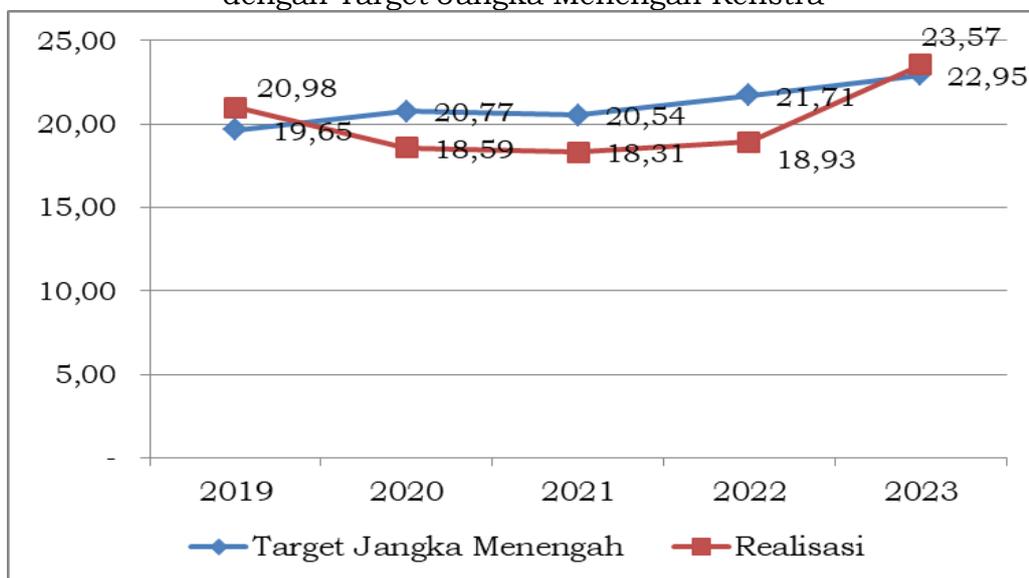
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target	
		2023*	Target Jangka Menengah
1	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	23,57	22,95
2	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,03	1,23
3	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	2,22	1,50
4	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	907,85	1.048,66

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.

*Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023

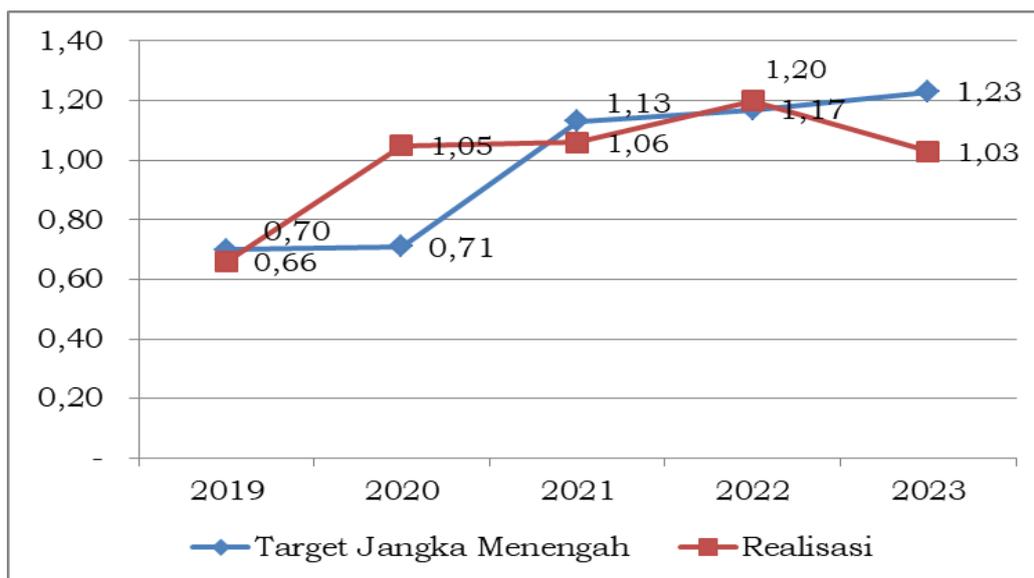
Perbandingan capaian indikator kinerja Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Tahun 2023 yaitu 23,57%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 22,95%, telah melebihi target sebesar 0,62% dari target jangka menengah, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik. 1
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra



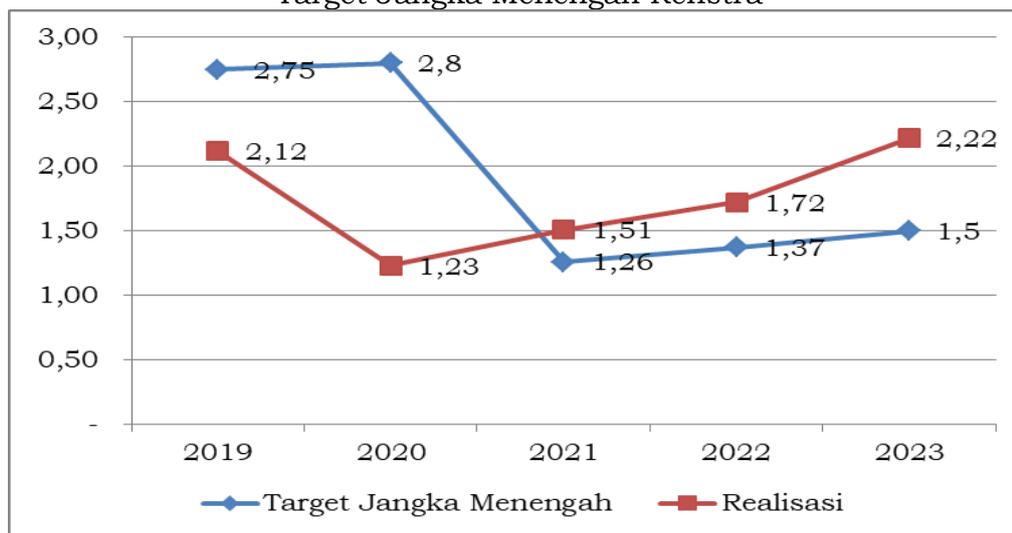
Untuk capaian indikator kinerja Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB Tahun 2023 yaitu 1,03%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 1,23 %, tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik. 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra



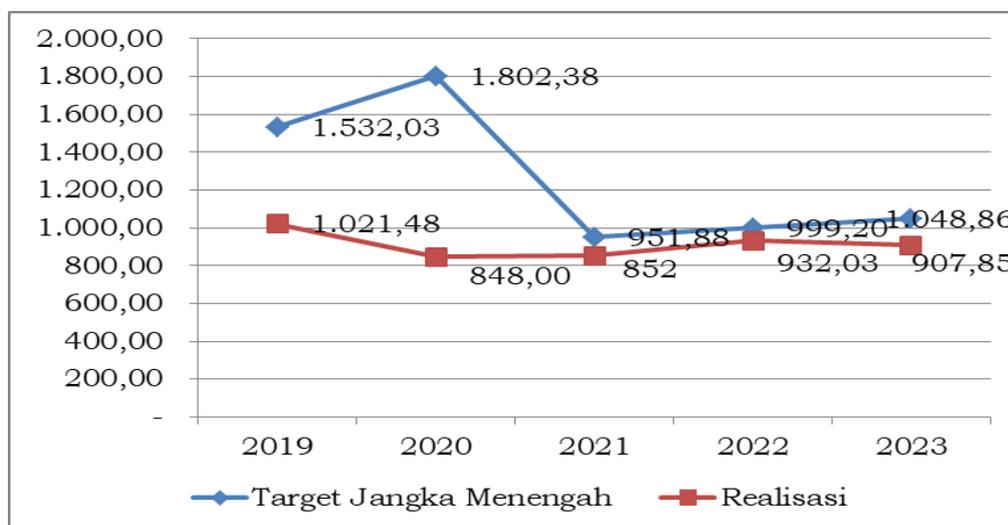
Perbandingan capaian indikator kinerja Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2022 yaitu 2,22%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 1,50%, telah melebihi target sebesar 0,72% dari target jangka menengah, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra



Untuk capaian indikator kinerja Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2023 yaitu 907,85 Kg, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 1.048,66 Kg masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2023 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2023*	Nasional**
1	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	23,57	2,32
2	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,03	1,44
3	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	2,22	3,76
4	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	907,85	7.691.105.000

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.

*Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023

**Data Sementara Menggunakan Data PDB Tahun 2022 dan Stok Beras Nasional update Data Badan Pangan Nasional per Oktober 2023

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan standar nasional realisasi indikator kinerja Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB sebesar 23,57% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDB Nasional sebesar 2,32%. Sedangkan realisasi kinerja untuk indikator Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB sebesar 1,03% dan Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,22% lebih rendah dibandingkan nilai standar nasional dengan nilai masing-masing 1,44% untuk kontribusi subsektor tanaman hortikultura terhadap PDB Nasional dan 3,76% untuk kontribusi subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB Nasional. Begitu pula dengan indikator ketersediaan pangan utama, nilainya sangat rendah

yaitu 907,85 kg bila dibandingkan dengan nilai ketersediaan pangan/cadang beras nasional sebesar 7,69 juta ton, yang merupakan gabungan dari seluruh ketersediaan pangan seluruh Indonesia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

➤ **Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB**

Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB pada tahun 2023 telah melebihi target kinerja, yaitu tercapai sebesar 102,70% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target kontribusi subsektor hortikultura dipengaruhi oleh peningkatan produksi beberapa komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah dan ubi kayu dan juga dipengaruhi oleh peningkatan harga rata-rata khususnya padi dan jagung di tingkat petani dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi kontribusi PDRB subsektor tanaman pangan.

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian berupa pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) pra panen pada sentra produksi tanaman pangan sebanyak 16 unit yang terdiri dari 2 unit traktor roda 4, 4 unit traktor roda 2 dan 10 unit pompa air;
2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa Pembangunan jaringan irigasi usaha tani, embung dan jalan tani masing-masing sejumlah 1 unit;
3. Pengendalian dan penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman berupa gerakan pengendalian (gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman khususnya hama tikus, yang dilakukan secara intensif dan massif di 11 Kecamatan bekerjasama dengan Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (IP3OPT) Wilayah V.
4. Peningkatan kualitas SDM bagi petani dan penyuluh pertanian melalui kegiatan sekolah lapang dan bimbingan teknis/pelatihan tematik.

5. Penambahan jumlah SDM Penyuluh Pertanian melalui Penyuluh Swadaya/Tenaga Penyuluh Bantu untuk mengatasi keterbatasan SDM untuk pengawalan dan pendampingan petani di lapangan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kontribusi subsektor tanaman antara lain:

1. Dampak perubahan iklim ekstrim *El Nino* yang menyebabkan kekeringan sehingga mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Terbatasnya alokasi anggaran APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian produksi komoditi tanaman pangan.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam untuk mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target dan meminta penambahan alokasi anggaran melalui TAPD.

➤ **Kontribusi Subsektor Hortikultura Terhadap PDRB**

Indikator sasaran kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB target 1,23% tercapai 1,03% atau tercapai sebesar 83,74%. Kontribusi subsektor hortikultura tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan produksi sebesar 32,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya pada jenis komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya dan pasca panen bagi para petani sentra hortikultura.
2. Pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada 5 (lima) Kelompok Wanita Tani dimana kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang Beragam,

Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA) serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga.

3. Pemberian bantuan bibit hortikultura melalui sumber dana APBD I berupa :

- Bibit alpukat untuk lahan seluas 108 Ha yang dialokasikan untuk 10 kelompok tani;
- Bibit rambutan untuk lahan seluas 133 Ha yang dialokasikan untuk 8 kelompok tani;
- Bibit durian untuk lahan seluas 61 Ha yang dialokasikan untuk 4 kelompok tani

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB, yaitu antara lain:

1. Dampak perubahan iklim ekstrim *El Nino* yang menyebabkan kekeringan sehingga mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air;
2. Tidak tersedianya dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah untuk pendampingan kegiatan bantuan bibit yang bersumber dari dana APBD I dan APBN.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kedepannya sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman dan perubahan musim pada masing-masing wilayah sentra hortikultura;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

➤ **Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB**

Sama halnya dengan kontribusi subsektor tanaman pangan, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2023 juga telah melebihi target kinerja secara signifikan, yaitu tercapai sebesar 148 % dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerjanya juga semakin meningkat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditi perkebunan unggulan yaitu cengkeh, dan peningkatan harga

rata-rata komoditi perkebunan di tingkat produsen (petani) yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya dan pasca panen bagi para petani sentra perkebunan.
2. Pemberian bantuan bibit perkebunan yang bersumber dari APBN berupa :
 - Bibit kelapa genjah untuk lahan seluas 110 Ha yang dialokasikan kepada 9 kelompok tani;
 - Bibit kopi arabika untuk lahan seluas 100 Ha yang dialokasikan kepada 6 kelompok tani.
3. Perluasan areal melalui kegiatan konstruksi lahan pertanian produktif areal perkebunan untuk komoditi lada seluas 40 hektar dan kopi robusta seluas 10 hektar, yang bersumber dari APBN.

Meskipun kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Umur tanaman komoditi perkebunan sebagian besar sudah tua sehingga produktivitasnya cenderung stagnan dan menurun;
2. Terbatasnya dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah untuk pendampingan kegiatan yang bersumber dari APBN.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk mempertahankan capaian kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan peremajaan untuk mengatasi tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif lagi;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

➤ **Ketersediaan Pangan Utama**

Indikator sasaran ketersediaan pangan utama target 1.048,66 kg tercapai 907,85 kg atau tercapai sebesar 86,57%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produktivitas sektor pertanian terutama komoditi padi yang secara langsung mempengaruhi supply beras/pangan utama.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja antara lain melaksanakan kegiatan :

1. Penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan untuk memperoleh informasi tentang penyediaan pangan, penggunaan dalam negeri dan ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk;
2. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan dan menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk kerentanan pangan;

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ketersediaan pangan antara lain:

1. Dampak perubahan iklim ekstrim *El Nino* yang mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi padi yang juga berdampak pada ketersediaan pangan;
2. Tidak tersedianya anggaran untuk pengisian lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai tempaan penyiapan cadangan pangan masyarakat dan menjamin akses dan kecukupan pangan.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim;
2. Memanfaatkan informasi ketersediaan pangan yang diperoleh dari laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan;
3. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah”** terdiri dari 6 (enam) Program sebesar Rp. 3.329.606.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.080.150.950 atau 92,51%. Dibanding dengan rata-rata capaian

kinerja pada sasaran ini sebesar 105,25%. Berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 12,74%. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	71.826.000	66.147.400	92,09
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.524.000	11.426.900	78,68
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.114.769.000	2.006.599.250	94,89
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	676.656.000	657.287.300	97,14
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.500.000	3.612.000	55,57
6	Program Penyuluhan Pertanian	445.331.000	335.078.100	75,24
	Jumlah	3.329.606.000	3.080.150.950	92,51

Sumber : Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan DTPHPKP pada Aplikasi *e-monev* Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah ini adalah sebanyak 6 program dan 9 kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdiri dari kegiatan:

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdiri dari kegiatan:

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota

6. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sasaran Strategis 2**Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** diukur dengan indikator Prediksi Nilai SAKIP yang dinilai dari hasil Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun analisis pencapaiannya sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Prediksi Nilai SAKIP	79 (BB)	72,40 (BB)	91,65
Rata-rata Capaian				91,65

Sumber : LHE SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2023.

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan”**, dengan Indikator Kinerja Prediksi Nilai SAKIP yaitu 91,65% sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu 91,65% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Realisasi “Prediksi Nilai SAKIP” sebesar 72,40 dengan kategori BB diperoleh dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	24,60 %
B	Pengukuran Kinerja	30 %	19,50 %
C	Pelaporan Kinerja	15 %	10,80 %
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50 %
Nilai Hasil Evaluasi		100 %	72,40 %
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB
Interpretasi			Sangat Baik

Sumber : LHE SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2023.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1	Prediksi Nilai SAKIP	68,97	71,41	72,40

Sumber : LHE SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Prediksi Nilai SAKIP mengalami tren berupa peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 68,97 (B) kemudian meningkat sebanyak 2,44 poin menjadi 71,41 (BB) pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 Nilai SAKIP kembali meningkat menjadi 72,40 (BB).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

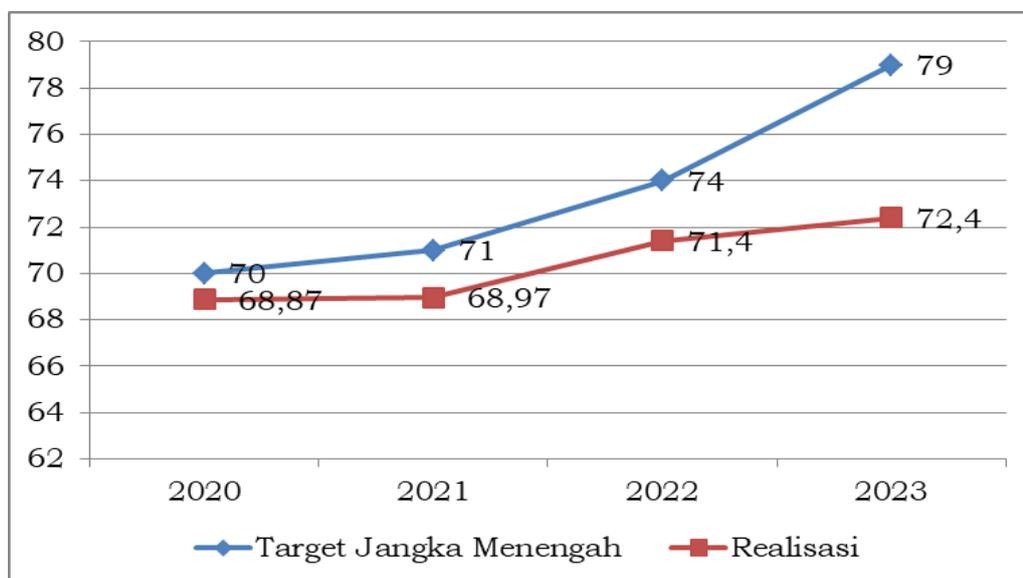
Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target	
		2023	Target Jangka Menengah
1	Prediksi Nilai SAKIP	72,40 (BB)	79 (BB)

Sumber : LHE SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2023.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prediksi Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 79 (BB), hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Prediksi Nilai SAKIP
dengan Target Jangka Menengah Renstra



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja sasaran strategis 2 Tahun 2023 dengan standar nasional dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023
dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2023	Nasional
1	Prediksi Nilai SAKIP	72,40 (BB)	63,36 (B)

Sumber : Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Tahun 2023.

Nilai SAKIP Nasional sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.12 merupakan rata-rata nilai SAKIP pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 secara nasional. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Nasional sebesar 63,36 (B), nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang lebih tinggi 9,04 poin dengan nilai 72,40 (BB).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, Capaian kinerja Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 sebesar 72,40 (BB) atau tercapai 91,65% dari target Nilai 79 (BB). Dengan skor tersebut maka peringkat penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam predikat “BB” dengan interpretasi Sangat Baik. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, namun Nilai SAKIP pada tahun 2023 meningkat sebanyak 0,99 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Nilai SAKIP antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2023. Perbaikan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja yaitu :
 - Memanfaatkan Rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran.
 - b. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja yaitu :
 - Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam melakukan Pengukuran Kinerja sehingga capaian atau *progress* kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat;
 - Hasil pengukuran (capaian) sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

- c. Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj yaitu :
 - Memanfaatkan Laporan Kinerja untuk melakukan perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
 - d. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tim AKIP internal OPD dalam hal ini perencana dan pengelola data kinerja dengan mengikuti *webinar* terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang merupakan aspek penilaian SAKIP.

Dalam pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat beberapa kriteria komponen implementasi AKIP yang belum terpenuhi secara memadai berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023, yaitu antara lain:

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja Pegawai/Fungsional belum ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja melainkan ditetapkan dalam bentuk SKP;
2. Realisasi capaian kinerja telah menunjukkan capaian maksimal atas target namun capaian yang disajikan berbeda antara beberapa dokumen (Laporan Monitoring, Laporan Pengukuran dan LKjIP);
3. Laporan Monitoring Kinerja, Laporan Pengukuran Kinerja dan Laporan Evaluasi Program Tahun 2022, belum menyajikan analisis perbaikan secara memadai dan tindak lanjut atas perbaikan kinerja belum tergambar pada monitoring dan pengukuran kinerja pada triwulan berikutnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja serta dasar dalam

penempatan/penghapusan jabatan baik struktural dan fungsional;

3. Laporan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam perumusan perubahan strategi kebijakan, penyesuaian aktivitas dan anggaran;
4. Laporan pengukuran kinerja belum menyajikan analisis perbandingan terbaik antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja sebagai gambaran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai anggaran;
5. Pengukuran kinerja individu yang dilakukan sebatas pada penilaian SKP di akhir tahun, dikarenakan belum ditetapkan perjanjian kinerja individu/pegawai.

C. Pelaporan Kinerja

1. Belum terdapat pelaksanaan reviu internal yang mendahului penetapan LKjIP Tahun 2022;
2. Telah disajikan simpulan umum atas capaian kinerja pada Bab IV LKjIP Tahun 2022 berupa langkah-langkah perbaikan kinerja organisasi, namun belum dijelaskan secara spesifik berdasarkan kondisi hasil capaian kinerja setiap indikator kinerja utama;
3. LKjIP Tahun 2022 hanya menyajikan informasi capaian kinerja utama, capaian kinerja pada setiap level/tingkat jabatan (eselon III dan IV) serta capaian kinerja individu tidak disajikan dalam LKjIP Tahun 2022;
4. Laporan LKjIP belum sepenuhnya menginformasikan korelasi realisasi anggaran kegiatan dengan capaian kinerja utama dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dicapai kedepan, serta belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Belum sepenuhnya evaluator AKIP telah bersertifikat, namun sebagian besar telah mengikuti diklat penyelenggaraan SAKIP dan penilaian AKIP baik yang diselenggarakan oleh Pusbinwas BPKP maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilaksanakan oleh APIP masih dalam tingkatan evaluasi terbatas, dan belum dapat dilaksanakan evaluasi mendalam (*in depth evaluation*);
3. Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dilaksanakan menggunakan teknologi informasi, namun pengumpulan data evaluasi perangkat daerah sebagian besar memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *eSakip Reviu* dan Portal Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbasis *website online*.

Dalam rangka pemenuhan kriteria komponen implementasi SAKIP yang belum terpenuhi secara memadai sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Merumuskan target kinerja individu/pegawai yang selaras dengan target pencapaian kinerja atasannya dalam bentuk Perjanjian Kinerja;
2. Konsisten dalam menyajikan realisasi capaian kinerja dalam dokumen Laporan Monitoring, Laporan Pengukuran dan LKJIP;
3. Menyajikan analisis perbaikan secara memadai dan tindak lanjut atas perbaikan kinerja pada monitoring dan pengukuran kinerja pada triwulan berikutnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengukuran kinerja;
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja serta dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural dan fungsional;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam perumusan perubahan strategi kebijakan, penyesuaian aktivitas dan anggaran;

4. Menyajikan analisis perbandingan terbaik antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja sebagai gambaran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai anggaran dalam laporan pengukuran kinerja;
5. Merumuskan target kinerja individu yang selaras dengan target pencapaian atasannya dalam bentuk perjanjian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Melakukan reviu atas draft LKjIP sebelum LKjIP ditetapkan, hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam berita acara atau surat pernyataan reviu dan dilampirkan dalam Dokumen LKjIP;
2. Menyajikan langkah-langkah perbaikan kinerja secara spesifik pada setiap indikator kinerja utama dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
3. Menyajikan informasi capaian kinerja utama, capaian kinerja pada setiap level/tingkat jabatan (eselon III dan IV) serta capaian kinerja individu Bab III LKjIP Tahun 2022;
4. Memanfaatkan informasi capaian kinerja untuk melakukan penyesuaian perencanaan kinerja dan perubahan budaya organisasi dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Mengalokasikan anggaran kegiatan pelatihan penyelenggaran SAKIP dan penilaian AKIP serta mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pelatihan dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2. Melakukan pendokumentasian data dasar kinerja pada setiap tingkatan jabatan/kinerja secara memadai dalam mendorong pelaksanaan Evaluasi AKIP secara mendalam (*in depth evaluation*) oleh APIP Daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendorong penerapan implementasi SAKIP dengan menggunakan basis teknologi informasi;
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 dalam rangka peningkatan implementasi dan nilai AKIP tahun 2023, dan bukti hasil tindak lanjut disampaikan secara berkala kepada Inspektorat Daerah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan”** terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp. 9.432.311.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.976.495.233 atau 95,17%. Dibanding dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 91,65%. Berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 3,52%. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.432.311.000	8.976.495.233	95,17
	Jumlah	9.432.311.000	8.976.495.233	95,17

Sumber : Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan DTPHPKP pada Aplikasi *e-monev* Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah ini adalah sebanyak 1 program dan 7 kegiatan, yaitu:

– **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Terdiri dari kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.13.307.135.000 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 13.270.135.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 37.000,000 yang seluruhnya merupakan akumulasi dari anggaran murni APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan DAK Non Fisik Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selanjutnya di dalam perubahan pertama (pergeseran) APBD Tahun 2023, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran bertambah menjadi Rp. 13.398.649.000 yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 13.328.557.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 70.092.000. Selanjutnya di dalam perubahan kedua APBD Tahun 2023, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 12.761.917.000 yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 12.685.725.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 76.192.000.

Realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 94,47% atau senilai Rp. 12.056.646.183 dan yang tidak terealisasi sebesar 5,53% atau senilai Rp. 705.270.817.

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023:

Tabel 3.14
 Realisasi Anggaran Kegiatan APBD Dinas Tanaman Pangan,
 Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.432.311.000	8.976.495.233	95,17
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.701.000	34.348.700	59,33
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.821.000	26.918.200	58,75
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.880.000	7.430.500	62,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.466.796.000	8.253.612.170	97,48
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.430.796.000	8.219.612.170	97,50
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	34.000.000	94,44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.586.000	291.471.850	96,01
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.058.000	-	-
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.528.000	291.471.850	96,66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.192.000	76.192.000	100
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.192.000	76.192.000	100

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.239.000	291.209.513	62,46
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.346.000	1.600.000	68,20
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	59.218.713	89,73
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.685.000	1.125.000	14,64
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.208.000	229.265.800	58,75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.797.000	29.661.000	48,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.932.000	29.661.000	66,01
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	-	-
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.865.000	-	-
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.114.769.000	2.006.609.250	94,89
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.114.769.000	2.006.609.250	94,89
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi	379.950.000	377.734.500	99,42

2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.734.819.000	1.628.874.750	93,89
III.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	71.826.000	66.147.400	92,09
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	40.901.000	35.653.500	87,17
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.023.000	20.880.500	83,45
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15.878.000	14.773.000	93,04
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	30.925.000	30.493.900	98,61
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.925.000	30.493.900	98,61
IV.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	676.656.000	657.287.300	97,14
	Pengembangan Prasarana Pertanian	21.815.000	8.268.500	37,90
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	21.815.000	8.268.500	37,90

	Pembangunan Prasarana Pertanian	654.841.000	649.018.800	99,11
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	137.963.000	136.699.000	99,08
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	113.152.000	109.842.000	97,07
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	319.958.000	319.750.800	99,94
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	73.493.000	72.893.000	99,18
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10.275.000	9.834.000	95,71
V.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.524.000	11.426.900	78,68
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.095.000	11.426.900	81,07
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.095.000	11.426.900	81,07
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	429.000	-	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	429.000	-	-

VI.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	6.500.000	3.612.000	55,57
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	6.500.000	3.612.000	55,57
1	Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6.500.000	3.612.000	55,57
VII.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	445.331.000	335.078.100	75,24
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	445.331.000	335.078.100	75,24
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	176.500.000	162.592.000	92,12
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	233.440.000	137.155.100	58,75
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28.400.000	28.400.000	100
4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	5.000.000	4.940.000	98,80
5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.991.000	1.991.000	100
	TOTAL	12.761.917.000	12.056.656.183	94,47

Sumber : Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan DTPHPKP pada Aplikasi *e-monev* Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	105,25 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	91,65 %	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian (%)		98.45	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu Sasaran Strategis “**Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**” dengan capaian sebesar 91,65%. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja tahun 2023 termasuk dalam kriteria sangat tinggi, namun mencermati hasil analisis masih terdapat hambatan dan permasalahan yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan untuk masing-masing indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

1. Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB

- Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam untuk mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim;
- Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target dan meminta penambahan alokasi anggaran melalui TAPD.

2. Kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB

- Mengaplikasikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman dan perubahan musim pada masing-masing wilayah sentra hortikultura;
- Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

3. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB

- Melakukan peremajaan untuk mengatasi tanaman perkebunan yang sudah tidak produktif lagi;
- Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

4. Ketersediaan pangan utama

- Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim;
- Memanfaatkan informasi ketersediaan pangan yang diperoleh dari laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan;
- Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target.

5. Prediksi Nilai SAKIP

- Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dengan melakukan langkah-langkah perbaikan pada komponen implementasi SAKIP yang belum terpenuhi secara memadai yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja akuntabilitas internal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dan disajikan. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 18 Januari 2024
Kepala Dinas

IBRAHIM, SP
Pangkat: Pembina TK. I, IV/b
NIP : 19720223 200003 1 002

**LAMPIRAN -
LAMPIRAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM, SP

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Sidenreng Rappang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. DOLLAH MANDO

Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 01 Nopember 2023

PIHAK KEDUA,

H. DOLLAH MANDO

PIHAK PERTAMA,

IBRAHIM, SP
NIP 19720223 200003 1 002

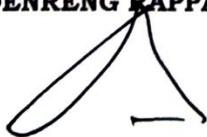
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	22,95 %
		Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB	1,23 %
		Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB	1,50 %
		Ketersediaan Pangan Utama	1.048,66 Kg
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Prediksi Nilai SAKIP	79 (BB)

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.432.311.000	APBD
II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 71.826.000	APBD
III. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 14.524.000	APBD
IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2.114.769.000	APBD/DAK
V. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 676.656.000	APBD
VI. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 6.500.000	APBD
VII. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 445.331.000	APBD
Jumlah	Rp 12.761.917.000	

Pangkajene Sidenreng, 01 Nopember 2023

BUPATI
SIDENRENG RAPPANG



H. DOLLAH MANDO

KEPALA DINAS



IBRAHIM, SP

NIP 19720223 200003 1 002

HASIL PENGUKURAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	22,95	23,57	102,70
		Kontribusi Hortikultura terhadap PDRB	%	1,23	1,03	83,74
		Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB	%	1,50	2,22	148,00
		Ketersediaan Pangan Utama	Kg	1.048,66	907,85	86,57
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Prediksi Nilai SAKIP	(BB)	79,00	72,40	91,65

Pangkajene Sidenreng, 05 Januari 2024

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

IBRAHIM, SP

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19720223 200003 1 002

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN

SUMBER DANA APBD DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.432.311.000	73,91	8.976.495.233	95,17	70,71	70,33	52,27		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.701.000	0,46	34.348.700	59,33	100,00	0,27	0,46		
2.09.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45.821.000	0,36	26.918.200	58,75	100	0,21	0,36	18.902.800	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			45.821.000	0,36	26.918.200	58,75	100				
2.09.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.880.000	0,11	7.430.500	62,55	100	0,06	0,11	6.069.500	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			11.880.000	0,11	7.430.500	62,55	100				
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.466.796.000	66,34	8.253.612.170	97,48	100,00	64,67	66,34		
2.09.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	8.430.796.000	66,05	8.219.612.170	97,5	100	64,4	66,05	211.183.830	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			8.430.796.000	66,05	8.219.612.170	97,5	100				
2.09.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.000.000	0,28	34.000.000	94,44	100	0,27	0,28	2.000.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			36.000.000	0,28	34.000.000	94,44	100				
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			303.586.000	2,38	291.471.850	96,01	50,00	2,28	1,19		
2.09.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.058.000	0,02	0	0	0	0	0	2.058.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			2.058.000	0,02	0	0	0				
2.09.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	301.528.000	2,36	291.471.850	96,66	100	2,28	2,36	10.056.150	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			301.528.000	2,36	291.471.850	96,66	100				
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76.192.000	0,60	76.192.000	100,00	105,00	0,60	0,63		
2.09.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	76.192.000	0,6	76.192.000	100	105	0,6	0,63	0	
	DAU - Belanja Modal - Pengadaan Langsung			76.192.000	0,6	76.192.000	100	105				
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			466.239.000	3,65	291.209.513	62,46	73,75	2,28	2,69		

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2.09.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.346.000	0,02	1.600.000	68,2	70	0,01	0,01	746.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			2.346.000	0,02	1.600.000	68,2	70				
2.09.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000	0,52	59.218.713	89,73	100	0,46	0,52	6.781.287	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			66.000.000	0,52	59.218.713	89,73	100				
2.09.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.685.000	0,06	1.125.000	14,64	45	0,01	0,03	6.560.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			7.685.000	0,06	1.125.000	14,64	45				
2.09.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	390.208.000	3,06	229.265.800	58,75	80	1,8	2,45	160.942.200	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			390.208.000	3,06	229.265.800	58,75	80				
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.797.000	0,48	29.661.000	48,00	30,00	0,23	0,15		
2.09.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	44.932.000	0,35	29.661.000	66,01	90	0,23	0,32	15.271.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			44.932.000	0,35	29.661.000	66,01	90				
2.09.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	0,08	0	0	0	0	0	10.000.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			10.000.000	0,08	0	0	0				
2.09.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6.865.000	0,05	0	0	0	0	0	6.865.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			6.865.000	0,05	0	0	0				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.114.769.000	16,57	2.006.609.250	94,89	100,00	15,72	16,57		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.114.769.000	16,57	2.006.609.250	94,89	100,00	15,72	16,57		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	379.950.000	2,98	377.734.500	99,42	100	2,96	2,98	2.215.500	
	DAK NON-FISIK - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			375.000.000	2,94	374.040.000	99,74	100				
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			4.950.000	0,04	3.694.500	74,64	100				
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.734.819.000	13,59	1.628.874.750	93,89	100	12,76	13,59	105.944.250	
	DAU - Belanja Operasi - Lelang			1.734.819.000	13,59	1.628.874.750	93,89	100				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			71.826.000	0,56	66.147.400	92,09	100,00	0,52	0,56		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			40.901.000	0,32	35.653.500	87,17	100,00	0,28	0,32		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan NeracaBahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca BahanMakanan	1 Laporan	25.023.000	0,2	20.880.500	83,45	100	0,16	0,2	4.142.500	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			25.023.000	0,2	20.880.500	83,45	100				
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	15.878.000	0,12	14.773.000	93,04	100	0,12	0,12	1.105.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			15.878.000	0,12	14.773.000	93,04	100				
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			30.925.000	0,24	30.493.900	98,61	100,00	0,24	0,24		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	30.925.000	0,24	30.493.900	98,61	100	0,24	0,24	431.100	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			30.925.000	0,24	30.493.900	98,61	100				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			676.656.000	5,30	657.287.300	97,14	100,00	5,15	5,30		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			21.815.000	0,17	8.268.500	37,90	100,00	0,06	0,17		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi PrasaranaPendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi PrasaranaPendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	21.815.000	0,17	8.268.500	37,9	100	0,06	0,17	13.546.500	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			21.815.000	0,17	8.268.500	37,9	100				
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			654.841.000	5,13	649.018.800	99,11	100,00	5,08	5,13		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	2 Unit	137.963.000	1,08	136.699.000	99,08	100	1,07	1,08	1.264.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			137.963.000	1,08	136.699.000	99,08	100				
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanEmbung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	113.152.000	0,89	109.842.000	97,07	100	0,86	0,89	3.310.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			113.152.000	0,89	109.842.000	97,07	100				
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanJalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	1 Unit	319.958.000	2,51	319.750.800	99,94	100	2,51	2,51	207.200	
	DAU - Belanja Operasi - Swakelola			319.958.000	2,51	319.750.800	99,94	100				
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanBalai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	73.493.000	0,58	72.893.000	99,18	100	0,57	0,58	600.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			73.493.000	0,58	72.893.000	99,18	100				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	10.275.000	0,08	9.834.000	95,71	100	0,08	0,08	441.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			10.275.000	0,08	9.834.000	95,71	100				
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			14.524.000	0,11	11.426.900	78,68	50,00	0,09	0,06		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			14.095.000	0,11	11.426.900	81,07	100,00	0,09	0,11		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan KerentananPangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	14.095.000	0,11	11.426.900	81,07	100	0,09	0,11	2.668.100	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			14.095.000	0,11	11.426.900	81,07	100				
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			429	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	429.000	0	0	0	0	0	0	429.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			429.000	0	0	0	0				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			6.500.000	0,05	3.612.000	55,57	90,00	0,03	0,05		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			6.500.000	0,05	3.612.000	55,57	90,00	0,03	0,05		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	650 Ha	6.500.000	0,05	3.612.000	55,57	90	0,03	0,05	2.888.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			6.500.000	0,05	3.612.000	55,57	90				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			445.331.000	3,49	335.078.100	75,24	98,00	2,63	3,42		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			445.331.000	3,49	335.078.100	75,24	98,00	2,63	3,42		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	176.500.000	1,38	162.592.000	92,12	100	1,27	1,38	13.908.000	
	DAK NON-FISIK - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			126.500.000	0,99	120.545.000	95,29	100				
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			50.000.000	0,39	42.047.000	84,09	100				
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	233.440.000	1,83	137.155.100	58,75	90	1,07	1,65	96.284.900	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			233.440.000	1,83	137.155.100	58,75	90				
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	28.400.000	0,22	28.400.000	100	100	0,22	0,22	0	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			28.400.000	0,22	28.400.000	100	100				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	5.000.000	0,04	4.940.000	98,8	100	0,04	0,04	60.000	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			5.000.000	0,04	4.940.000	98,8	100				
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1.991.000	0,02	1.991.000	100	100	0,02	0,02	0	
	DAU - Belanja Operasi - Pengadaan Langsung			1.991.000	0,02	1.991.000	100	100				
JUMLAH				12.761.917.000	100	12.056.656.183			94,47	99		